

BAB II

PBB SEBAGAI ORGANISASI RESOLUSI KONFLIK RUSIA-UKRAINA DI CRIMEA DAN DINAMIKA KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Pada bab ini akan menjelaskan variabel eksplanasi yaitu efektifitas PBB sebagai organisasi resolusi konflik Rusia-Ukraina di Crimea. Pada bab ini, pertama akan menjelaskan bagaimana latar belakang konflik Rusia-Ukraina dan respon PBB dalam menanggapi konflik tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan dinamika konflik pasca resolusi yang dikeluarkan.

2.1. PBB Sebagai Organisasi Internasional Resolusi Konflik

Nama *United Nations* atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Nama tersebut pertama kali digunakan dalam deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942, yang diadakan diantara berlangsungnya PD II. Sebanyak 26 bangsa berkumpul untuk mengadakan perlawanan terhadap negara-negara fasis dan mendukung adanya sebuah rencana untuk mencapai perdamaian dunia.¹ Kemudian, pada tahun 1945, sebanyak 50 negara berkumpul di San Fransisco untuk berkumpul dalam Konferensi PBB. Pertemuan ini membahas tentang pembuatan Piagam PBB. Piagam PBB telah diciptakan oleh wakil dari negara-negara China, Amerika Serikat, Inggris dan Uni

¹ United Nations, 2004, *Basic Facts About the United Nations*, New York : News and Media Division of United Nations Department of Public Information, hal. 3

Soviet. Kemudian, PBB dinyatakan pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945. Piagam PBB telah diretifikasi oleh China, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Setelah sebelumnya, Piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara-negara pada 26 Juni 1945. Piagam PBB inilah kemudian yang menjadi dasar dari sistem PBB.²

Selama pendirian PBB, PBB memang telah menjadi organisasi internasional yang dapat mencegah terbentuknya Perang Dunia Baru. Namun, PBB tidak menahan adanya konflik yang terjadi di wilayah regional di berbagai belahan dunia. Tercatat sudah ada lebih dari 150 konflik yang telah menelan 20 juta lebih korban jiwa, dan PBB tidak seluruhnya dapat mengatasi konflik-konflik tersebut.³

Ketika ada situasi tertentu di mana resolusi yang telah ditetapkan PBB atau kondisi dimana konflik tersebut sudah dianggap dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional, PBB dapat menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu kepada negara yang melanggar tersebut. DK PBB dapat menjatuhkan sanksi ketika kepada suatu negara dalam 3 hal. Jika suatu negara melanggar prinsip-prinsip yang secara langsung dapat mengancam perdamaian dan jika tidak dipatuhi maka negara tersebut dapat dikenakan sanksi ekonomi yang kemudian dapat diikuti dengan pemberian sanksi militer.⁴

Terdapat ketiga hal yang dapat menyebabkan sebuah negara dapat dikenakan sanksi oleh PBB. Pertama, jika suatu negara mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian. Kedua, jika suatu negara melanggar perdamaian. Ketiga,

² Ibid

³ Sumaryo Suryokusumo, 2012, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: PT ALUMNI, hal. 158

⁴ Ibid, hal. 12

suatu negara tersebut melancarkan suatu agresi kepada negara lain. Banyak perdebatan mengenai ketiga kondisi yang telah ditetapkan dimana suatu negara dapat dikenakan sanksi militer ataupun ekonomi oleh PBB. Tidak ada kesepakatan mengenai kejelasan batasan-batasan tentang melanggar perdamaian yang dimaksud dalam tiga kondisi tersebut. Demikian pula dengan pengertian mengenai ‘tindakan agresi’ juga banyak diperdebatan dalam merumuskan dan sesudah PBB berjalan.⁵

Sebelum diadakannya sanksi militer dan ekonomi yang dapat dijatuhkan kepada negara-negara tersebut, PBB terlebih dahulu melakukan sidang-sidang untuk membahas persoalan-persoalan atau konflik tertentu. Sidang-sidang tersebut untuk membahas permasalahan yang ada di lapangan yang sesuai dengan tugas atau kewajiban yang ditanggung oleh badan-badan utama PBB. Selama berdirinya PBB, organisasi internasional ini telah beberapa kali menyelesaikan permasalahan dari beberapa badan utamanya.

Selama berdirinya PBB melalui DK PBB terdapat beberapa kondisi di mana PBB pernah menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang dianggap melanggar atau mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Negara yang pernah mendapatkan sanksi militer dan sanksi ekonomi salah satunya adalah Iraq. Sanksi militer pada november 1990 dikenakan kepada Iraq karena invasi Iraq ke Kuwait yang sebelumnya Iraq juga mendapatkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada agustus 1990.⁶

⁵ Ibid, hal. 12

⁶ Ibid, hal. 14

Sanksi ekonomi juga pernah dijatuhkan kepada Yugoslavia yang tidak mengindahkan 8 resolusi yang telah dikeluarkan DK PBB pada tahun 1991. Beberapa situasi di Yugoslavia dianggap dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Termasuk beberapa kejadian yang memberatkan posisi Yugoslavia diantaranya penyerangan terhadap anggota Pasukan Perdamaian PBB termasuk anggota Palang Merah Internasional, pelanggaran gencatan senjata, dan sebagainya.⁷

Selain DK PBB, Sekretaris Jenderal PBB juga beberapa kali telah berjasa dalam beberapa konflik yang pernah terjadi selama PBB berdiri. Salah satu konflik pertumpahan darah yang dapat dicegah oleh PBB adalah sengketa Siprus pada tahun 1980. Sengketa tersebut melibatkan Sekretaris Jenderal PBB untuk mencegah pertumpahan darah yang berkelanjutan antara etnis Turki dan Yunani yang telah terjadi selama 20 tahun.⁸

Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan suatu negara untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika negara anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB tersebut dalam menghadapi perselisihan antar negara. Sebelum suatu negara mengajukan persoalan sengketa kepada PBB, negara-negara yang berselisih tersebut harus melakukan usaha terlebih dahulu untuk melakukan langkah-langkah yang menjunjung tinggi perdamaian seperti melalui perundingan, perantara. Jika suatu situasi dianggap tidak dapat lagi dibendung, maka pihak-pihak bersengketa baik negara tersebut termasuk anggota

⁷ Ibid, hal. 15

⁸ J.G. Strike, 1989, *Introduction to International Law*, London: Butterworths, hal. 512

PBB atau bukan anggota PBB dapat mengajukan kepada Sekretaris jenderal PBB atau Majelis Umum PBB sehingga mendapatkan perhatian dari DK PBB, atau bahkan dapat mengajukan sendiri kepada DK PBB.⁹ Karena DK PBB-lah yang selalu memiliki wewenang untuk urusan keamanan dan perdamaian internasional yang merupakan tanggung jawab utama dari DK PBB.¹⁰

Namun, negara-negara tersebut mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara damai. Ketika mengalami perselisihan yang timbul diantara negara-negara, maka sebelum mengajukan ke PBB, para pihak bersengketa wajib mencari penyelesaian melalui perundingan, pernyataan, perantara, perujukan, arbitrase, melalui jalan damai melalui lembaga regional atau segala macam jalan yang menurut mereka dapat mencapai perdamaian. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, setiap pihak bersengketa, atau Sekretaris Jenderal PBB atau setiap anggota PBB dapat mengajukan kepada DK atau Majelis Umum untuk menjadi perhatian badan-badan utama tersebut. Biasanya, hampir di setiap khusus DK sering dianggap sebagai wasit karena DK yang memiliki tanggung jawab utama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹¹

Ketika membahas urusan keamanan dan perdamaian internasional tidak terlepas dari ketiga badan utama PBB yang memiliki peran penting untuk menjalankan kepentingan-kepentingan PBB terhadap urusan keamanan dan perdamaian. Karena ketiga badan tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama

⁹ Sumaryo Suryokusumo, 2012, Op.cit, hal. 187

¹⁰ Ibid, hal. 188

¹¹ Ibid, hal. 187

lain dalam persoalan bagaimana sebuah sengketa internasional yang dianggap dapat mengancam perdamaian internasional. Ketiga badan utama tersebut adalah DK PBB yang memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap keamanan dan perdamaian internasional, Sekretaris jenderal yang memiliki tanggung jawab tambahan dan tanggung jawab politik secara eksplisit, dan Majelis Umum yang memiliki tanggung jawab residual (*residual responsibility*). Ketiga tanggung jawab tersebut memiliki peranan penting dalam urusan keamanan dan perdamaian internasional.¹² Ketiga tanggung jawab itu saling mempengaruhi kerja masing-masing badan-badan utama tersebut. Seperti contohnya, dalam urusan masalah keamanan dan perdamaian internasional, Sekretaris Jenderal memiliki wewenang untuk merekomendasi atau meminta perhatian DK PBB dalam beberapa sengketa internasional yang dapat dianggap membahayakan perdamaian. Hal ini karena Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab tambahan (*Extra-responsibility*).¹³ Majelis Umum juga memiliki tanggung jawab residual terhadap usaha-usaha pemeliharaan keamanan dan perdamaian disamping tanggung jawab utama DK PBB.

Tabel 2.1 Tanggung Jawab Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam Urusan Penyelesaian Sengketa Internasional

No	Badan Utama PBB	Tanggung Jawab dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	Pengertian
1.	Dewan Keamanan	<i>Primary Responsibility</i>	Tanggung jawab utama DK untuk mempertahankan keamanan dan

¹² Sumaryo Suryokusumo, 2015, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa)*, Jakarta: PT. Tatanusa, hal.34

¹³ Lihat Pasal 99 Piagam PBB bahwa Sekretaris Jenderal PBB dapat meminta perhatian DK untuk kasus yang dianggapnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional

			perdamaian internasional karena hanya DK PBB yang dapat menentukan suatu kasus tersebut dapat mengancam perdamaian atau tidak.
2.	Sekretaris Jenderal	<i>Extra-responsibility</i>	tanggung jawab Sekretariat Jenderal untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan atau kasus yang dapat menjadi ancaman keamanan dan perdamaian internasional. Sekretaris jenderal dapat meminta perhatian DK PBB terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat membahayakan atau mengancam perdamaian.
		<i>Explicit Political Responsibility</i>	tanggung jawab Sekretariat Jenderal PBB sebagai mediator, melakukan jasa-jasa baik dalam rangka penyelesaian pertikaian secara damai tanpa rekomendasi DK PBB dan negara-negara anggota, sebagai informal advisor untuk negara-negara anggota, dan menjaga harmonisasi dalam tindakan-tindakan berbagai negara.
3.	Majelis Umum	<i>Residual Responsibility</i>	Tanggung jawab ketika DK PBB gagal untuk mengambil resolusi masalah keamanan dan perdamaian internasional, maka Majelis Umum dapat membicarakan persoalan tersebut dalam kurun waktu 24 jam dan mengadakan sidang darurat khusus.

Sekretariat Jenderal memiliki 2 macam tanggung jawab yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa internasional dalam PBB. Kedua tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab tambahan (*Extra-responsibility*) dan tanggung jawab politik secara eksplisit (*Explicit Political Responsibility*). Tanggung jawab tambahan adalah tanggung jawab Sekretariat Jenderal untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan atau kasus yang dapat menjadi ancaman keamanan dan perdamaian internasional. Sehingga Sekretariat Jenderal dapat meminta perhatian

Dewan Keamanan PBB terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap oleh Sekretariat Jenderal PBB merupakan termasuk kasus keamanan dan perdamaian internasional yang telah menjadi wewenang dari DK PBB. Selanjutnya, tanggung jawab politik secara eksplisit diartikan sebagai tanggung jawab Sekretariat Jenderal PBB sebagai mediator, melakukan jasa-jasa baik dalam rangka penyelesaian pertikaian secara damai tanpa rekomendasai DK PBB dan negara-negara anggota, sebagai informal advisor untuk negara-negara anggota, dan menjaga harmonisasi dalam tindakan-tindakan berbagai negara.¹⁴

Dalam menjalankan tugas-tugasnya semua Sekretariat Jenderal PBB dan staff sekretariat tidak boleh mencari ataupun menerima perintah dari negara-negara lain ataupun aktor-aktor internasional lainnya.¹⁵ Peran Jenderal Sekertaris PBB dalam melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa internasional, dapat merupakan tindakan aktif tanpa harus mengikuti persetujuan dari badan-badan lain ataupun dapat merupakan rekomendasi dari badan-badan utama PBB yang lain. Ada 3 tindakan atau peran Sekretaris jenderal PBB untuk melakukan tanggung jawabnya.¹⁶

Tabel 2.2 Peran Sekretaris Jenderal PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

No	Peran Sekertarus Jenderal PBB	Pengertian
1.	Good Offices atau Pemberian Jasa Baik	tindakan pihak ketiga dalam suatu sengketa internasional untuk membawa atau

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal. 159-160

¹⁶ Melly Aida & Ria Wierma Putri, 2011, *Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, Lampung : Universitas Hukum, hal. 138-139

		memfasilitasi ke arah negosiasi tanpa ikut berdiskusi aktif tentang isi pokok sengketa tersebut
2.	Mewakili DK PBB dan Majelis Umum Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Internasional	Tindakan pihak ketiga dalam suatu sengketa internasional untuk membawa ke arah negosiasi pada penyelesaian sengketa internasional yang berperan aktif dalam diskusi atau pembicaraan sengketa dan memberikan saran-saran yang adil dan tidak memihak
3.	Mewakili DK PBB dan Majelis Umum Sebagai Konsiliator	Konsilator adalah pembuatan panitia untuk menemukan fakta-fakta yang terdapat pada sengketa internasional

Peran Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa internasional yang pertama adalah pemberian jasa baik atau *Good Offices*. *Good Offices* adalah tindakan pihak ketiga dalam suatu sengketa internasional untuk membawa atau memfasilitasi ke arah negosiasi tanpa ikut berdiskusi aktif tentang isi pokok sengketa tersebut. *Good Offices* merupakan salah satu penyelesaian sengketa secara mediasi yang merupakan campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa internasional. Campur tangan tersebut hanya berupa memberikan nasehat dan tidak mengikat. Sekretaris Jenderal PBB juga dalam melakukan peran untuk menyelesaikan sengketa internasional tidak berdiskusi secara aktif dalam pembahasan sengketa internasional tersebut.¹⁷

Sekretaris jenderal PBB juga berperan untuk mewakili DK PBB dan Majelis Umum PBB sebagai mediator pada suatu penyelesaian sengketa internasional. Berbeda dengan peran Sekretaris jenderal PBB untuk melakukan *Good Offices*, mediator dalam suatu penyelesaian sengketa internasional harus berperan aktif

¹⁷ Ibid.

dalam diskusi dan pembicaraan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional. Sekretaris jenderal PBB sebagai mediator juga membawa kearah negosiasi untuk penyelesaian sengketa internasional. Sehingga peran Sekertaris Jenderal PBB sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa internasional adalah berperan aktif dan ikut serta dalam pembicaraan penyelesaian sengketa dan memberikan saran-saran penyelesaian sengketa secara adil dan tidak memihak.¹⁸

Selain itu, tindakan atau peran Sekretaris jenderal PBB dalam suatu penyelesaian konflik internasional adalah konsiliator. Konsiliator artinya pembuatan kepanitiaan untuk mengumpulkan fakta-fakta dilapangan tengan konflik internasional tersebut sehingga ada laporan secara resmi mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik internasional dan sebagainya. Pembuatan panitia atau komisi penyelidikan yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas sebab-sebab timbulnya suatu sengketa internasional. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan tersebut digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa namun rekomendasi tersebut bersifat tidak mengikat.¹⁹

DK PBB memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) dalam rana keamanan dan perdamaian internasional. Sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang tepat dan efektif, anggota memberikan mandat tentang keamanan dan perdamaian internasional kepada DK PBB. Anggota akan

¹⁸ Ibid, hal. 137

¹⁹ Ibid, hal. 142

menyetujui keputusan yang diambil DK PBB dalam urusan keamanan dan perdamaian internasional yang sesuai dengan Piagam PBB.²⁰

Ada beberapa alasan DK PBB kenapa dikatakan memiliki tanggung jawab tentang urusan keamanan dan perdamaian internasional. Pertama, anggota tetap DK PBB memiliki hak veto sehingga ketika suatu resolusi tidak dapat disepakati oleh anggota tetap DK PBB, maka resolusi yang telah dibuat tidak dapat diambil. Kedua, dengan jumlah negara anggota PBB yang sudah mencapai 192 negara, jumlah keanggotaan DK PBB tergolong sangat sedikit dengan total jumlah hanya 15 negara saja. Selain itu, dengan jumlah negara yang menjabat di DK PBB, segala tindakan dan keputusan DK PBB mengatas namakan seluruh negara anggota PBB karena seluruh negara anggota PBB memberikan mandat untuk urusan keamanan dan perdamaian internasional kepada DK PBB.²¹

DK sendiri memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara otomatis berkaitan dengan tanggung jawab utama yang DK miliki. Fungsi pertama adalah fungsi deliberatif. Fungsi deliberatif ialah fungsi DK PBB sebagai tempat untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut tentang keamanan dan perdamaian internasional. Setelah permasalahan dibahas dalam sidang, DK dapat melakukan penyelidikan terhadap situasi atau konflik yang dapat menimbulkan pertikaian internasional. Jika memang benar situasi tersebut dapat menimbulkan pertikaian internasional, maka DK harus membuat resolusi atau rekomendasi mengenai cara-

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, 2015, Op.cit, hal. 98

²¹ Sumaryo Suryokusumo, 2012, Op.cit. hal.

cara yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Piagam PBB.²² Pasal 33 Piagam PBB tersebut menyatakan tentang untuk menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, penyelesaian sengketa melalui lembaga regional, atau penyelesaian sengketa lainnya yang memakai cara masing-masing pihak yang bersengketa.²³

Tabel 2.3 Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan PBB²⁴

NO	Fungsi dan Kekuasaan	Pengertian
1.	Fungsi Deliberatif	badan yang menyediakan arena untuk membicarakan dan membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang situasi dan konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
2.	Fungsi Organisasi	pengambilan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Majelis Umum PBB yang sebelumnya memerlukan persetujuan terlebih dahulu oleh DK PBB
3.	Fungsi Penyelesaian Sengketa	memiliki wewenang untuk menyelesaikan suatu secara damai dan menggunakan cara-cara yang dapat mencapai perdamaian.
4.	Fungsi Pemaksaan	Fungsi yang hanya dimiliki oleh DK PBB. Hanya keputusan DK PBB yang dapat menerapkan fungsi pemaksaan berupa pemberian sanksi ekonomi atau sanksi militer yang dapat mengikat negara anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB.

Piagam PBB memberikan hak kepada DK PBB untuk menjalankan kewajibannya. Kewajiban yang dilakukan DK PBB mulai dari tahun 1946 telah ditentukan *Provisional Rules of Procedure of Security Council* yang berisi tata cara

²² Ibid, hal. 103

²³ *Charter of the United Nations*, diakses dalam <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, (29/11/2017, 18:01 WIB)

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, 2015, *Op.cit*, hal.

dan aturan yang dilakukan DK PBB dalam melakukan tanggung jawab utamanya.²⁵

Dalam rangka memenuhi tujuan utama khususnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, DK menempuh dua pendekatan yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai dan tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan agresi.²⁶

Usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan DK sebagai sebuah bentuk tanggung jawab terhadap menjaga keamanan dan perdamaian internasional dapat dilakukan ketika suatu negara tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut sendiri, sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika suatu negara telah mengajukan persengketaan tersebut kepada DK, maka DK dapat membentuk penyelidikan untuk memeriksa apakah situasi tersebut cukup serius untuk dapat membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. Setelah itu, DK PBB dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menyerukan kepada pihak-pihak bertikai untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara damai yang sesuai dengan piagam PBB. Ketika negara-negara yang bersengketa tersebut gagal untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai, maka DK PBB dapat menentukan langkah selanjutnya.²⁷ Usaha penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan oleh DK PBB contohnya seperti pembuatan komite jasa-jasa baik, komite penyelidikan dan mediasi, misi penyelidikan, pasukan perdamaian PBB, dan lain-lain.²⁸

²⁵ Ibid, hal. 100

²⁶ Ibid, hal. 193

²⁷ Ibid, hal. 194

²⁸ Ibid.

Dalam urusan tindakan yang dilakukan DK terhadap ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi, DK dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara yang dianggap melanggar ketiga hal tersebut dan hanya DK yang dapat menentukan sanksi tersebut dari badan-badan utama PBB lainnya.²⁹

Pengertian tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dapat dibedakan di dalam dua pengertian. Pengertian pertama, yang ada kaitannya dengan Bab VI Piagam PBB yaitu, apabila terjadi pertikaian antar negara berlanjut dan mungkin dapat mengancam perdamaian dapat diselesaikan secara damai tanpa diikuti dengan sanksi ekonomi maupun politik. Pengertian kedua, dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yaitu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 39-51 Piagam jika tidak mengindahkan keputusan DK.³⁰

Tabel 2.4 Pengertian Tindakan Ancaman Perdamaian dan Tindakan yang dapat ditempuh Menurut Piagam PBB

Bab Pada Piagam PBB	Pengertian dan Tindakan
Ada kaitan dengan Bab VI	Apabila terjadi pertikaian antar negara berlanjut dan mungkin dapat mengancam perdamaian dapat diselesaikan secara damai tanpa diikuti dengan sanksi ekonomi maupun politik
Ada kaitan dengan Bab VII	Apabila suatu negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB secara langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 39-51

²⁹ Ibid, hal. 198-199

³⁰ Ibid

	Piagam PBB jika tidak mengindahkan keputusan DK
--	---

Poin terakhir merupakan point yang hanya dimiliki DK. Hanya DK yang dapat memaksa negara-negara lewat sanksi ekonomi maupun militer. Namun DK memiliki batasan-batasan kekuasaan dalam melakukan tindakannya. PBB khususnya DK hanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang harusnya berdasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB sendiri. Tujuan –tujuan dan perinsip tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB yaitu untuk pemulihan keamanan dan perdamaian internasional yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan keadilan dan hukum internasional.³¹

Sesuai dengan Pasal 41, Piagam PBB sebelum menggunakan tindakan militer, PBB dapat menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk menerapkan sanksi ekonomi atau sanksi diplomasi seperti memutuskan kerjasama atau hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, radio dan lain-lain.³² Sanksi ekonomi pernah diberikan kepada Rhodesia Selatan yang melakukan proklamasi sepihak yang sebelumnya secara administrasi berada dibawah pemerintahan inggris. Tindakan Rhodesia Selatan tersebut dianggap dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional bagi DK PBB sehingga dalam kurun tahun 1945 hingga 1990, kasus Rhodesia Selatan merupakan satu-satunya konflik yang mendapatkan sanksi ekonomi DK PBB.³³

³¹ Ibid, hal. 81

³² Sumaryo Suryokusumo, 2012, *Op.cit*, hal. 21

³³ Ibid, hal. 22

Ketika tindakan-tindakan sanksi ekonomi maupun diplomatik dianggap tidak dapat membuat negara yang melanggar atau tidak mengindahkan keputusan DK, maka DK dapat mengambil tindakan militer. Guna melakukan sanksi militer, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan DK untuk melakukan sanksi tersebut. Terdapat tiga persyaratan yang harus ditempuh DK untuk melakukan sanksi militer kepada negara-negara anggota maupun bukan negara anggota PBB yang tidak mengindahkan resolusi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh PBB.³⁴

Pertama, tindakan militer yang dilakukan oleh DK atas nama seluruh anggota PBB harus memiliki persetujuan atau atas persetujuan antara Dewan Keamanan dan anggota PBB. Persetujuan khusus ini merupakan syarat utama DK untuk melakukan tindakan militer. Sehingga, tanpa persetujuan khusus dari anggota PBB dan DK sendiri, sanksi militer tidak dapat diambil. Hal ini terdapat pada Pasal 43 Piagam PBB. Melihat contoh kasus sanksi militer yang pernah diterapkan DK pada Iraq pada tahun 1990, tindakan DK PBB tersebut tidak melalui prosedur ini.³⁵

Kedua, pembentukan Komite Staf Militer (*Military Staff Committee*) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45-47 Piagam PBB. Kepala staf angkatan perang dari 5 anggota tetap DK memberikan rekomendasi kepada DK untuk setiap tindakan militer yang akan dilakukan untuk negara yang melanggar peraturan. Sehingga, setiap anggota PBB dan bahkan anggota tetap DK sendiri tidak dapat melakukan tindakan sanksi militer apapun tanpa rekomendasi dari Komite Staf Militer tersebut.³⁶

³⁴ Ibid,

³⁵ Ibid, hal. 24

³⁶ Ibid

Ketiga, Dewan Keamanan harus memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum untuk segera menentukan dan menyetujui anggaran tambahan dari anggaran belanja PBB untuk kebutuhan tindakan sanksi militer. Ketika Majelis Umum tidak di dalam waktu persidangan maka, Sidang Luar Biasa atau Sidang Khusus dapat dilakukan untuk menentukan anggaran tambahan tindakan militer DK tersebut. Aksi-aksi militer yang dilancarkan oleh DK harus ditanggung seluruh anggota PBB.³⁷

Ketika DK PBB gagal dalam mengambil langkah untuk mengambil resolusi tentang kasus keamanan dan perdamaian internasional, maka masih ada badan utama PBB yang dapat melanjutkan tanggung jawab tersebut. Badan utama tersebut adalah Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab residual (*Residual responsibility*) yang dapat menjadi tanggungan Majelis Umum ketika DK gagal mengambil resolusi.

Tabel 2.5 Fungsi dan Wewenang Majelis Umum Pada Penyelesaian Sengketa Internasional

Fungsi Majelis Umum	Pengertian
Fungsi Ekstra atau Fungsi Tambahan yang menjadi Tanggung Jawab Residual (<i>Residual Responsibility</i>)	DK harus memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum untuk melaksanakan Sidang Darurat Khusus untuk konflik yang dapat mengancam perdamaian dengan 9 suara afirmatif dan tanpa suara bulat anggota tetap DK PBB.
Fungsi Umum dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai (<i>Peaceful Settlement of Dispute Function</i>)	Majelis Umum dapat memberikan rekomendasi tentang langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai kepada anggota PBB dan juga kepada DK PBB

³⁷ Ibid, hal 25

Residual responsibility Majelis Umum merupakan fungsi ekstra atau fungsi tambahan dari badan utama PBB tersebut yang merupakan perkembangan baru. Dikatakan sebagai perkembangan baru terhadap fungsi dari Majelis Umum karena fungsi ekstra dari Majelis Umum ini dibahas terpisah dari Piagam PBB. Fungsi ekstra ini muncul sejak tahun 1950 setelah Majelis Umum PBB menandatangani resolusi 377A (V) “*Uniting for Peace Resolution*” yang menyangkut tentang pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional.³⁸

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan Majelis Umum ketika DK PBB gagal untuk mengambil resolusi konflik. Biasanya DK gagal karena adanya salah satu atau lebih dari anggota tetap DK menggunakan hak veto terhadap resolusi yang akan diambil oleh DK. Jika DK gagal untuk mencegah tindakan agresi atau menindak lanjuti tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, DK dapat meminta Majelis Umum untuk mengadakan Sidang Darurat Khusus. Agar dalam waktu 24 jam Majelis Umum dapat membicarakan situasi atau konflik yang mengancam perdamaian tersebut. Dalam resolusi Majelis Umum 337A (V) tersebut, juga membicarakan kemampuan Majelis Umum untuk mengambil langkah penyelesaian konflik. Bahkan dalam resolusi tersebut, Majelis Umum memiliki kemampuan untuk mengambil langkah menggunakan pasukan untuk menyelesaikan konflik.³⁹

Selain itu, Majelis Umum juga memiliki fungsi penyelesaian sengketa secara damai (*Peaceful Settlement of Dispute Function*). Fungsi ini merupakan

³⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2015, *Op.cit*, hal. 34

³⁹ *Ibid*, hal. 34

salah satu kewenangan umum yang dimiliki Majelis Umum. Kewenangan ini dimiliki karena Majelis Umum merupakan satu-satunya badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota PBB. Fungsi dan wewenang penyelesaian sengketa secara damai yang dimiliki hanya sebatas wewenang umum seperti memberikan rekomendasi kepada seluruh anggota PBB terhadap tindakan yang harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa secara damai. Majelis Umum juga dapat memberikan rekomendasi kepada DK agar melakukan tindakan yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa secara damai.⁴⁰

Resolusi yang diadptasi oleh Majelis Umum, akan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal kepada anggota PBB dalam waktu 15 hari setelah Sidang Penutupan PBB.⁴¹ Setiap anggota PBB memiliki satu suara untuk voting. Terdapat resolusi yang diadaptasi dari Majelis Umum, resolusi yang dapat mengikat dan resolusi yang hanya dapat sebagai rekomendasi saja.

Urusan keamanan dan perdamaian merupakan urusan yang menyangkut masalah *external* PBB yang menyangkut urusan tekanan moral dan tekanan politik. Sehingga dalam urusan resolusi yang menyangkut *external* PBB, kekuatan resolusi tersebut bersifat rekomendasi saja dan tidak memiliki ikatan kepada negara-negara anggota PBB lainnya. Contoh dari rekomendasi yang bersifat rekomendatif adalah resolusi-resolusi yang berkaitan tentang perdamaian dan keamanan internasional, resolusi untuk menegaskan kembali adanya aturan-aturan hukum kebiasaan

⁴⁰ Ibid, hal. 30

⁴¹ Lihat Rules 59 of Rules of Procedure of The General Assembly

internasional dan menyatakan prinsip-prinsip hukum secara umum yang dapat merupakan sumber hukum internasional.⁴²

Ada pula beberapa resolusi yang dapat mengikat. Resolusi tersebut adalah resolusi-resolusi yang bersangkutan dengan urusan *internal* PBB. Resolusi tersebut dapat berupa resolusi yang berkaitan dengan mata-mata acara yang disusun oleh negara-negara anggotanya kedalam agenda Majelis Umum PBB. Selain itu resolusi-resolusi yang dapat mengikat adalah resolusi-resolusi yang berkaitan tentang administrasi PBB seperti anggaran PBB, pengangkatan sekjen, masuknya negara anggota baru PBB dan lain sebagainya.⁴³

2.2. Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina di Crimea

Wilayah Crimea sendiri sebenarnya merupakan wilayah yang memang terjadi beberapa kali perubahan kebijakan yang dilakukan Rusia terhadap wilayah tersebut. Sebelumnya Crimea pernah dianeksasi pada tahun 1780-an pada masa pemerintahan Catherine II atau yang biasa dijuluki *Catherine The Great*. Catherine II terkenal dengan keunggulan untuk memperluas wilayah Kerajaan Rusia dan salah satunya memperluas daerah Kerajaan Rusia ke wilayah Crimea. Merebut wilayah tersebut dari suku Tartar yang berada dibawah pemerintahan Kerajaan Otoman atau *Otoman Emphire* pada waktu itu.⁴⁴

⁴² Ibid, hal. 39

⁴³ Ibid, hal. 38

⁴⁴ John Paxton, 2004, *Leaders of Russia and The Soviet Union*, London: Taylor & Francis, Inc., hal. 41

Konflik Rusia-Ukraina di Crimea berawal dari terjadi setelah penangguhan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa oleh Presiden Ukraina yang menjabat pada waktu itu, yaitu Presiden Viktor Yanukovych. Presiden Yanukovych memang arah kebijakannya condong ke Rusia daripada Uni Eropa.⁴⁵ Salah satu bentuk kebijakan Viktor Yanukovych yang cenderung mengarah kepada Rusia salah satunya adalah ketika Rusia membeli hutang Ukraina sebesar 15 miliar dolar dan penangguhan Perjanjian dengan Uni Eropa dan lebih memilih bekerjasama dengan Rusia.⁴⁶

Sebelumnya, Rusia telah mengintervensi pemilu yang terjadi di Ukraina pada tahun 2004 dengan memberikan dukungan pada Viktor Yanukovych. Intervensi tersebut dilakukan Rusia dengan cara memberi sumbangan kepada kampanye Viktor Yanukovych. Salah satunya, pemberian aliran dana sebesar \$800 juta dari Rusia ke Ukraina untuk bantuan kampanye ke media masa dimana saluran televisi nasional Rusia yang banyak ditonton oleh rakyat Ukraina yang mendukung Viktor Yanukovych. Melihat sejarah bagaimana hubungan Presiden Viktor Yanukovych dengan Rusia ini kemudian menimbulkan sikap skeptis kepada Presiden tersebut yang menimbulkan beberapa aksi protes susulan setelah Revolusi Oranye di tahun 2014.⁴⁷

Tabel 2.6 Timeline Latar Belakang Krisis Ukraina

Tahun	Tanggal	Peristiwa
2010	Februari	Kontroversi kemenangan Viktor Yanukovych yang dianggap melakukan kecurangan dalam Pemilu Ukraina dan diduga dibantu oleh pihak Rusia.
2013	21 November	Ukraina dibawah pemerintahan Viktor Yanukovych menunda penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan

⁴⁵ Octab Alifiansyah, Op.cit., hal. 2

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ahmad Yoni Setiawan, 2014, *Intervensi Politik Terhadap Proses Pemilu Ukraina (Studi Pada Terpilihnya Viktor Yushchenko Sebagai Presiden Ukraina 2004-2010)*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 34

2014		Uni Eropa yang membawa Ukraina selangkah lagi untuk berintegrasi dengan organisasi regional Uni Eropa.
	Akhir November	Protes akan kebijakan penundaan Perjanjian Asosiasi. 100.000 orang datang berdemonstrasi di Kiev.
	Awal Desember	Protes kedua menentang penundaan penandatanganan Perjanjian Asosiasi, sebanyak 800.000 orang datang untuk berdemonstrasi
	16-23 Januari	Aksi protes berubah menjadi aksi kerusuhan yang menelan korban setelah sebelumnya Pemerintah Ukraina mengambil kebijakan hukum anti protest setelah pada tgl 17 Desember, Ukraina menerima bantuan hutang dari Rusia sebesar 15 miliar dolar.
	14-18 Februari	Semenjak Desember 2013, sudah ada 234 protestan telah ditangkap karena melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan Viktor Yanukovych. Pada tanggal 18 Februari, bentrokan terjadi dan menewaskan 18 orang.
	20 Februari	Bentrokan masih terjadi sekitar 88 orang meninggal dalam kurun dua hari terhitung setelah 18 Februari.
	21 Februari	Viktor Yanukovych menandatangani perjanjian dengan group oposisi untuk melakukan pemilihan umum lebih cepat daripada yang direncanakan.
	22 Februari	Parlemen Ukraina mengkudeta Viktor Yanukovych dan menentukan tgl 25 Mei melakukan pemilu untuk presiden baru. Presiden Yanukovych menghilang dan muncul kembali setelah mengumumkan bahwa kudeta yang dilakukan oleh Parlemen tidak sah.
	23-26 Februari	Olexander Turchynov dipilih Parlemen Ukraina untuk menjadi Presiden sementara. Arseniy Yatsenyuk menjadi nominasi Perdana Menteri Ukraina.
	27-28 Februari	Kelompok bersenjata telah mengelilingi wilayah Crimea
	1 Maret	Parlemen Rusia menyetujui pengiriman pasukan Rusia ke Crimea

Akibat Penangguhan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang merupakan titik awal dalam integrasi antara Ukraina dengan Uni Eropa, terjadi protes besar-besaran untuk menolak kebijakan Viktor Yanukovych tersebut. Terdapat sekitar 100,000 orang berkumpul untuk menolak kebijakan tersebut di gedung

pemerintahan di Kiev, Ukraina.⁴⁸ Kemudian, aksi protes tersebut semakin besar hingga berujung dengan protes anti pemerintah pada awal Desember 2013 dengan sekitar 800,000 orang berkumpul di Kiev menuntut Presiden Yanukovych untuk bertemu dengan demonstran. Bahkan, beberapa demonstran mencoba untuk menerobos masuk barisan polisi yang menjaga di sekitar gedung pemerintahan untuk bertemu dengan Presiden Yanukovych.⁴⁹

Aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan Presiden Yanukovych memburuk beriringan dengan dibuatnya undang-undang *anti-protest*. Undang-undang *anti-protest* tersebut berisi tentang larangan untuk menggunakan helm oleh demonstran dan pemblokiran tempat-tempat umum dan juga larangan untuk menyebarkan berita buruk dan menghina pejabat pemerintahan. Undang-undang tentang *anti-protest* kemudian dicabut kembali oleh Parlemen Ukraina.⁵⁰ Namun, hal itu tidak menghentikan aksi demonstrasi dan keadaan semakin memburuk hingga pecahnya kerusuhan dengan menewaskan sekitar 88 orang dalam kurun waktu 48 jam.⁵¹

Pada Februari 2014, sekelompok orang bersenjata yang lengkap dan tidak diketahui identitas tepatnya berpakaian selayaknya pasukan militer profesional, berhasil merebut dan mengepung beberapa gedung penting seperti gedung pemerintahan dan gedung parlemen Crimea. Pasukan pro-Russia tersebut

⁴⁸ BBCNews, 2013, *Huge Ukraine rally over EU agreement delay*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-25078952>, (09/07/2017, 9:06 WIB)

⁴⁹ BBCNews, 2013, *Ukraine protests: 'Fringe' demonstrators storm council*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/av/world-europe-25177679/ukraine-protests-fringe-demonstrators-storm-council>, (09/07/2017, 9:08 WIB)

⁵⁰ BBCNews, 2014, *Ukraine crisis: Parliament abolishes anti-protest law* diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-25923199>, (09/07/2017, 9:25 WIB)

⁵¹ BBCNews, 2014, *Timeline Ukraine Crisis*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>, (09/07/2017, 9:28 WIB)

mengibarkan bendera Rusia di gedung pemerintahan dan gedung parlemen Crimea yang telah dikepungnya.⁵² Pada 1 Maret, Parlemen Rusia menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin untuk mengirimkan pasukan tentara Rusia ke Crimea. Rusia mengirimkan helikopter tempur, delapan pesawat kargo militer Rusia ke Ukraina. Sekaligus mengirimkan kapal militer Rusia ke Pelabuhan Sevastopol. Pengiriman pasukan militer Rusia ke Crimea ini mendapatkan respon protes keras dari dunia internasional.⁵³ Tidak cukup dengan hal tersebut, tepat pada Vladimir Putin juga menandatangani undang-undang tentang penyatuan kembali Republik Crimea dengan Rusia.⁵⁴ Pernyataan atas kemerdekaan Crimea sebagai negara berdaulat disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pernyataan persnya yang diterima Tempo dari Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada Maret 2014. Keputusan ini ditentang oleh pemerintah Ukraina termasuk Uni Eropa dan dianggap sebagai bentuk aneksasi oleh Rusia di Crimea.⁵⁵

⁵² Harret Salem, Luke Harding, dan Shaun Walker, 2014, *Crimean Parliament Seized by Unknown pro-Russian Gunman*, The Guardian, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/crimean-parliament-seized-by-unknown-pro-russian-gunmen>, (14/08/2016, 9:21 WIB)

⁵³ Choirul, 2014, *Pasukan Rusia Mengalir Masuk ke Crimea*, Tempo, diakses dalam <https://dunia.tempo.co/read/news/2014/03/03/117559100/pasukan-rusia-mengalir-masuk-ke-crimea>, (14/07/2017, 10:31 WIB)

⁵⁴ TASS, *Putin Sign On Reunification of Republic of Crimea and Stavapol with Russia*, TASS, diakses dalam <http://tass.com/russia/724785>, (17/11/2016/, 18:32)

⁵⁵ Tempo, 2014, *Rusia Resmi Akui Krimea Menjadi Negara Republik*, diakses dalam <https://m.tempo.co/read/news/2014/03/18/117563290/rusia-resmi-akui-crimea-jadi-negara-republik>, (17/11/2016. 18,43 WIB)

2.3. PBB Sebagai Organisasi Resolusi Konflik Internasional dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina di Crimea

Resolusi yang dikeluarkan PBB pertama kali dalam konflik Rusia-Ukraina adalah resolusi tentang integritas wilayah Ukraina yang telah dilanggar oleh Rusia dengan cara menganeksasi wilayah Crimea tersebut dari Ukraina. Pada pembuatan resolusi tersebut terdapat dua resolusi yang dibuat oleh kedua badan utama dari PBB, yaitu DK PBB dan Majelis Umum PBB. Kedua resolusi tersebut telah melalui proses yang panjang untuk membuat dan beberapa perdebatan telah dilakukan dalam sidang.⁵⁶

Permasalahan konflik Ukraina-Rusia ini kemudian diangkat setelah Duta Besar Ukraina untuk PBB memberikan surat pengajuan tentang ancaman terhadap keamanan dan perdamaian yang terjadi di wilayahnya. Yuriy Sergeyev melaporkan bahwa ada pergerakan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Rusia tanpa seijin Ukraina telah mengepung wilayah perbatasan Ukraina dengan menambah pasukan militer Rusia. Pada tanggal 28 Februari 2014 saat surat tersebut dikirimkan kepada presiden DK PBB, sekitar 2.000 pasukan militer Rusia telah berada di perbatasan Ukraina.⁵⁷ Kemudian, pada tanggal 12 Maret militer Rusia yang ada pada

⁵⁶ Alexander Nekrassov, Op.cit.

⁵⁷ Baca surat Yuriy Sergeyev untuk Presiden DK PBB dalam mengajukan konflik yang terjadi di Ukraina

Yuriy Surgeyev, 2014, *Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, diakses dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf, (12/09/2017, 23:24 WIB)

Baca artikel Saun Walker di The Guardian yang melaporkan bahwa ada sekitar 2000 pasukan militer Ukraina terlihat di perbatasan Rusia-Ukraina

Saun Walker, 2014, *Russian 'invasion' of Crimea Fuels Fear of Ukraine Conflict*, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/russia-crimea-white-house>, (15/11/2017, 8:34 WIB)

perbatasan Ukraina sudah mencapai angka 80.000 pasukan militer yang diletakan pada perbatasan Ukraina-Rusia.⁵⁸



Gambar 2.1 Pasukan Militer Rusia yang Ada di Perbatasan Ukraina Sampai Tanggal 12 Maret 2014⁵⁹

Sejak didirikannya PBB, PBB memiliki tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh masing-masing negara anggota PBB. Prinsip dasar tersebut salah satunya adalah larangan bagi masing-masing negara untuk menggunakan militer untuk mengancam kedaulatan wilayah negara lain. Tindakan Rusia untuk menambah pasukan militernya di wilayah perbatasan Ukraina-Rusia menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan wilayah Ukraina sendiri.⁶⁰ Pasal dalam Piagam PBB

⁵⁸ Tim Shipman & Will Stewart, 2014, *Red Army Masses On Ukraine Border*, diakses dalam <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2579168/Ukraine-warns-scale-invasion-Russia-moves-artillery-close-borders-Kiev-security-chief-says-Putins-troops-run-three-hours.html>, (15/11/2017, 8:36 WIB)

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Baca Piagam PBB Pasal 2 ayat 4

Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice, diakses dalam <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, (02/10/2017, 23:51 WIB)

yang berbicara tentang kedaulatan wilayah negara dan larangan negara lain untuk menggunakan militer untuk melanggar teritorial wilayah negara lain terdapat pada Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut⁶¹ :

“All member shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations.”

Dalam menyikapi konflik Ukraina-Rusia ini dan menanggapi surat yang telah dikirimkan Yuriy Sergeyev sebagai Duta Besar Ukraina untuk PBB yang mewakili negaranya, DK PBB melakukan Sidang tertutup pertama kali untuk konflik Ukraina-Rusia pada tanggal 28 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2014. Seluruh total persidangan yang dilakukan adalah 6 Sidang DK PBB. Dua sidang dilakukan tertutup dan sisanya dilakukan secara terbuka.⁶²

Ada beberapa hukum internasional yang dilanggar oleh Rusia. Diantaranya pelanggaran hukum internasional dalam larangan penggunaan kekerasan militer dan hukum internasional dalam pengecualian terhadap larangan penggunaan kekerasan militer terhadap wilayah teritorial suatu negara. Rusia juga melanggar beberapa Perjanjian Multilateral diantaranya: *The Helsinki Final Act*; *The Commonwealth of Independent States*; *Memorandum Budapest*; *The Friendly Relations Declaration*; dan *The NATO-Russia Founding Act*. Selain itu, Rusia juga

Baca surat dari Yuriy Sergeyev bahwa tindakan Rusia di perbatasan Ukraina dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional

Yuriy Surgeyev, 2014, *Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, diakses dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf, (12/09/2017, 23:24 WIB)

⁶¹ *Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice*, hal. 3, diakses dalam <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, (02/10/2017, 23:51 WIB)

⁶²

melanggar beberapa Perjanjian Bilateral dengan Ukraina diantaranya Traktat Persahabatan Rusia-Ukraina (*The Friendship Treaty Rusia-Ukraine*) dan Perjanjian Perizinan Akses ke Black Sea (*Agreements Permitting Access to the Black Sea*). Tidak cukup disitu, Rusia juga melanggar beberapa prinsip hukum internasional. Beberapa hukum internasional yang dilanggar oleh Rusia diantaranya adalah prinsip adat untuk tidak mengintervensi atau ikut campur dengan urusan negara lain (*Customary Principle of Non-Intervention*), penghormatan terhadap kemerdekaan dan integritas wilayah teritorial negara-negara, dan prinsip tentang tidak mengakui teritorial yang didambalalih secara ilegal (*The Principle of Non-Recognition of Territorial Acquisition*).⁶³

Sidang dalam DK PBB kemudian berakhir pada tanggal 15 Maret 2014 dengan hasil sebuah Resolusi S/2014/189. Resolusi tersebut gagal diimplementasikan pada konflik Crimea karena veto Rusia terhadap resolusi tersebut. China yang merupakan ‘teman’ Rusia di PBB menyatakan abstain. Sisanya, termasuk Amerika, Inggris, dan Perancis menyatakan setuju dengan resolusi tersebut.⁶⁴ Resolusi DK PBB yang mendapatkan veto dari Rusia berisikan tentang beberapa point berikut⁶⁵ :

“1. Menegaskan kembali komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina dalam batas yang diakui secara internasional.”

“2. Mendesak semua pihak untuk segera menyelesaikan penyelesaian damai dari perselisihan ini melalui dialog politik langsung, untuk menahan diri, untuk menahan diri tindakan sepihak dan segala bentuk tindakan yang dapat

⁶³ Madeline Olliver, 2015, *An International Legal Analysis of Russia's Intervention in Ukraine*, Disertasi, New Zealand: Bachelor of Law, the University of Otago, hal 17-27

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ UNSC, 2014, *Resolution : S/2014/189*, diakses dalam http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/189, (13/10/2017, 8:34 WIB)

meningkatkan ketegangan, dan terlibat sepenuhnya dengan upaya mediasi internasional.”

“3. Panggilan kepada Ukraina untuk terus menghormati dan menjunjung kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan untuk melindungi hak semua orang di Ukraina, termasuk hak-hak kaum minoritas, dan dalam hal ini, menyambut baik pernyataan pemerintah transisi di Ukraina yang menegaskan komitmen untuk menegakkan hak semua orang Ukraina, termasuk kelompok minoritas, dan dialog politik nasional.”

“4. Ukraina sebagai pemerintahan resmi tidak menyetujui pembuatan referendum yang ada di wilayah Crimea.”

“5. Menyatakan bahwa referendum Crimea tidak memiliki validitas, dan tidak dapat membentuk dasar untuk setiap perubahan status Crimea, dan meminta semua Negara, organisasi internasional dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui adanya perubahan status Crimea atas dasar referendum ini dan untuk menahan diri dari tindakan atau transaksi apapun yang dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan atas status yang berubah tersebut.”

“6. Memutuskan untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap kasus ini.”

Walaupun Resolusi S/2015/189 tidak dapat diambil akibat veto dari Rusia untuk menghentikan proses aneksasi Crimea oleh Rusia dari Ukraina. Resolusi yang menyatakan integritas wilayah teritorial Ukraina juga diambil di Majelis Umum PBB pada pertemuan yang ke-80 Majelis Umum PBB, menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, independensi kemerdekaan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional, yang menggarisbawahi ketidakabsahan referendum 16 Maret yang diadakan di Crimea.⁶⁶ Sebelumnya, Referendum Crimea digelar pada tanggal 16 Maret 2014 yang menghasilkan kemenangan atas Rusia. Sebanyak 95,5% penduduk Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Namun, referendum yang digelar ini mengundang banyak kontroversi dari masyarakat internasional.⁶⁷

⁶⁶ United Nations, 2014, *General Assembly Adopts Resolution Calling upon States Not to Recognize Changes in Status of Crimea Region*, diakses dalam <http://www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm>, (12/09/2017, 23:41 WIB)

⁶⁷ BBCNews, 2014, *Crimea referendum: Voters 'back Russia union'*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-26606097>, (02/10/2017, 19:16 WIB)

Isi dari Resolusi yang telah ditetapkan Majelis Umum untuk masalah integritas wilayah Ukraina terhadap aneksasi Crimea oleh Rusia adalah bagaimana resolusi tersebut mengajak negara-negara anggota PBB dan negara-negara yang bukan anggota PBB untuk melakukan langkah-langkah yang telah ditetapkan pada Resolusi A/68/L.89. Beberapa point yang ditetapkan pada resolusi tersebut ialah⁶⁸:

“1. Menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina di dalam batas yang diakui secara internasional.”

“2. Panggilan atas semua Negara untuk berhenti dan menahan diri dari tindakan yang ditujukan gangguan dari kesatuan nasional dan integritas teritorial Ukraina, termasuk upaya untuk mengubah batas-batas Ukraina melalui ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan melanggar hukum lainnya.”

“3. Mendesak semua pihak untuk segera menyelesaikan resolusi damai situasi sehubungan dengan krisis Ukraina melalui dialog politik langsung, untuk menahan diri, menahan diri dari tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan dan untuk terlibat sepenuhnya dengan upaya mediasi internasional.”

“4. Membantu Ukraina dalam melindungi hak semua orang di Ukraina, termasuk hak-hak orang-orang yang termasuk minoritas.”

“5. Tidak mengakui bahwa referendum diadakan di Republik Otonom Crimea dan kota Sevastopol pada tanggal 16 Maret 2014, tidak memiliki validitas, tidak dapat membentuk dasar untuk perubahan status Republik Otonomi Crimea atau kota Sevastopol.”

“6. Panggilan atas semua Negara, organisasi internasional dan khususnya instansi untuk tidak mengetahui adanya perubahan status Crimea dan kota Sevastopol atas dasar referendum yang digelar untuk pemisahan wilayah Crimea dari Ukraina dan untuk menahan diri dari tindakan atau transaksi apapun yang dapat diartikan sebagai pengakuan atas status yang berubah tersebut.”

⁶⁸ United Nations, 2014, *Referendum A/RES/68/262 : Territorial integrity of Ukraine*, diakses dalam http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262, (12/10/2017, 16:22 WIB)

2.4. Status Crimea Pasca Resolusi dan Penyebaran Konflik di Timur Ukraina

Republik Crimea menyatakan kemerdekaannya setelah menyelenggarakan referendum yang memuat tentang pemisahan Crimea dari Ukraina pada tanggal 16 Maret 2017. Hasil dari referendum tersebut sebanyak 95,5% penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Sebanyak 58% penduduk Crimea merupakan etnis Rusia dan sisanya merupakan etnis Ukraina dan etnis Tartar.⁶⁹

Setelah DK gagal mengambil Resolusi S/2014/289 yang membahas tentang integritas wilayah teritorial Ukraina. Usaha PBB dalam menjaga perdamaian internasional tidak sampai disitu saja. Majelis Umum pada tanggal 24 Maret berhasil mengadopsi Resolusi A/RES/68/262 yang juga membicarakan masalah integritas wilayah teritorial Ukraina dan penolakan terhadap perubahan batasan-batasan negara tersebut.⁷⁰

Tabel 2.7 Timeline Dinamika Konflik Rusia-Ukraina Pasca Resolusi A/RES/68/262

No	Tanggal	Peristiwa
1.	1 Maret 2014	Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta kepada Parlemen Rusia untuk menyetujui pengiriman pasukan Rusia ke Crimea.
2.	15 Maret 2014	DK PBB tidak berhasil mengeluarkan resolusi S/2014/189 karena veto Rusia terhadap Resolusi yang membicarakan tentang integritas wilayah teritorial Ukraina.
3.	16 Maret 2014	Penyelenggaraan pembuatan referendum di Crimea
4.	18 Maret 2014	Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani referendum bersatunya Crimea ke Rusia sekaligus mengakui bahwa Crimea merupakan negara yang merdeka dari Ukraina.

⁶⁹ Palupi Anisa Auliani, 2014, *Putin Tanda Tangani Dekrit Akui Referendum Crimea*, Kompas.com, diakses dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/18/0200189/Putin.Tanda.Tangani.Dekrit.Akui.Referendum.Crimea>, (15/07/2017, 9:46 WIB)

⁷⁰ Alexander Nekrassov, 2014, *Op.cit*

5.	21 Maret 2014	Perkembangan korban dari demonstrasi penggulingan Presiden Yanukovich. 102 orang tewas dan 1419 terluka
6.	24 Maret 2014	Majelis Umum PBB berhasil mengambil resolusi A/68/L.39 tentang integritas teritorial Ukraina dan mengakui bahwa referendum yang dilakukan di Crimea merupakan ilegal dan tidak mengakui adanya negara Crimea yang bergabung dengan Federasi Rusia.
7.	7-8 April 2014	Pengunjuk rasa menduduki gedung pemerintah di kota-kota Ukraina timur Donetsk, Luhansk dan Kharkiv, menyerukan sebuah referendum kemerdekaan dan melepaskan diri dari Ukraina. Pemerintah Ukraina mendapatkan kembali kontrol bangunan pemerintahan Kharkiv pada 8 April 2014.
8.	15 April 2014	Ukraina menggelar aksi anti terorisme melawan pemberontak dan mulai menyelenggarakan aksi militer untuk melawan pemberontak.
9.	17 April 2014	Bentrokan terjadi di Mariupol, Ukraina. 3 orang meninggal dunia dari kelompok sparatis.
10.	2 Mei 2014	Bentrokan terjadi di Kota Black Sea, Odesa. 42 orang meninggal dunia
11.	14 Juni 2014	Kelompok sparatis menembak jatuh pesawat Ukraina. 49 orang meninggal dunia
12.	25 Juni 2014	Rusia membatalkan aksi untuk menambahkan pengiriman pasukan militer ke Ukraina timur
13.	5 Juli 2014	Kelompok sparatis meninggalkan pusat komando mereka di Sloviansk dalam menghadapi serangan pemerintah.
14.	17 Juli 2014	Penyebaran konflik memakan korban. Pesawat MH17 tertembak rudal yang diduga merupakan rudal yang dimiliki kelompok sparatis. Korban 289 orang tewas.
14.	22 Agustus 2014	Bantuan kemanusiaan yang berasal dari Rusia dikirimkan ke wilayah Luhansk tanpa ijin dari Ukraina.
15.	29 Agustus 2014	Laporan korban meninggal disampaikan di Kiev oleh Ivan Simonovik, Asisten Sekretaris Jenderal HAM PBB. ⁷¹ Sebanyak sekitar 36 orang meninggal setiap hari. 2593 korban meninggal dunia semenjak April 2014.

Majelis Umum telah mengadopsi Resolusi A/RES/68/262 dan menunaikan tanggung jawab yang dimiliki badan utama tersebut. Namun, konflik tidak semakin reda dengan rekomendasi tersebut. Parahnya, konflik semakin menyebar di beberapa wilayah timur Ukraina. Penduduk-penduduk kota seperti Luhansk,

⁷¹ Ruslan Burhani, 2014, *Korban Tewas dalam Konflik Ukraina Hampir 2.600 Orang*, diakses dalam <http://www.antaranews.com/berita/450990/korban-tewas-dalam-konflik-ukraina-hampir-2600-orang>, (26/20/2017, 16:30 WIB)

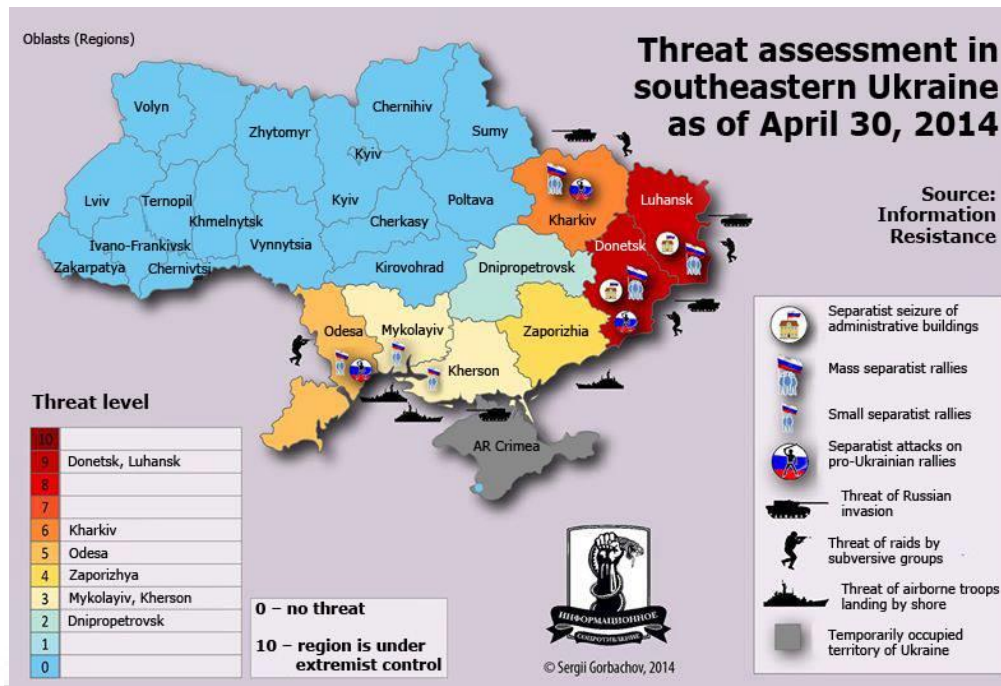
Donetsk, dan Kharkiv menduduki gedung-gedung pemerintahan dan menuntut untuk diadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 7 April 2014. Walaupun pada tanggal 8 April 2014, gedung-gedung pemerintahan yang telah diduduki oleh penduduk yang menuntut untuk diadakan referendum tersebut, dapat dikuasai kembali oleh pemerintah Ukraina.⁷²

Beberapa bentrokan juga akhirnya terjadi di daerah penyebaran konflik. Diantaranya, bentrokan tersebut terjadi di kota Mariupol, Ukraina pada tanggal 17 April 2014. Terdapat 3 orang meninggal dunia dari bentrokan tersebut. Korban tewas merupakan penduduk dari kelompok protestan yang menuntut kemerdekaan wilayahnya.⁷³ Selain itu bentrokan juga terjadi di Kota Black Sea, Odesa pada tanggal 2 Mei setelah pemerintah mengumumkan perlawanan terhadap gerakan-gerakan yang melawan pemerintah pada 22 April 2014. Sebanyak 42 korban meninggal dunia direnggut oleh peristiwa tersebut.⁷⁴

⁷² BBCNews, 2014, *Ukraine Timeline Crisis*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>, (21/10/2017, 6:15 WIB)

⁷³ BBCNews, 2014, *Ukraine Timeline Crisis*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>, (21/10/2017, 6:15 WIB)

⁷⁴ Ibid



Gambar 2.2 Peta Penyebaran Konflik Rusia-Ukraina⁷⁵

Penyebaran konflik tidak hanya menyebabkan bentrokan-bentrokan kecil di beberapa wilayah timur Ukraina. Beberapa kejadian penembakan terhadap pesawat yang merenggut jumlah korban yang lumayan banyak juga terjadi. Terjadi penembakan terhadap dua pesawat yang melintas pada area penyebaran konflik. Pertama, pesawat tempur milik Ukraina tertembak jatuh tepat di wilayah konflik menyebar yaitu Luhansk yang merupakan wilayah Ukraina yang sangat dekat dengan Rusia. Akibat dari peristiwa ini menelan 49 korban meninggal dunia.⁷⁶ Kedua, pesawat MH17 Malaysia yang mengangkut penumpang sipil tertembak rudal bukt yang diduga dimiliki oleh kelompok sparatis di wilayah bagian Donetsk

⁷⁵ Bill Humphrey, 2014, *Ukraine Crisis Map (as of Aug 28, 2014)*, diakses dalam <http://arsenalfordemocracy.com/wp-content/uploads/2014/04/2014-ukraine-crisis-map.png>, (16/10/2017, 22:22 WIB)

⁷⁶ BBCNews, 2014, *Ukraine Crisis: Military Plane Shot Down in Luhansk*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-27845313>, (26/10/2017, 16:55 WIB)

yang juga merupakan wilayah penyebaran konflik di Ukraina. Akibat dari peristiwa ini sebanyak 298 korban warga sipil tewas.⁷⁷

Walaupun resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB sudah dikeluarkan, namun peristiwa angkat senjata dan saling tembak menembak antara kedua pihak, baik pihak Rusia, maupun pihak kelompok Crimea sendiri tidak dapat dihindari. Beberapa kali pertempuran terjadi setelah resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan. Akibat konflik yang meluas dan serangan senjata dari kedua belah pihak terus berlanjut, PBB sebagai organisasi internasional angkat bicara. Pada awal maret 2015, PBB memperingatkan bahwa jumlah estimasi korban yang telah gugur akibat konflik yang telah menyebar di timur Ukraina telah mencapai 6000 korban meninggal dunia semenjak April 2014. Jumlah tersebut akan terus bertambah ketika konflik tidak segera dihentikan.⁷⁸

Jumlah korban yang mencapai 6000 korban jiwa tidak menghentikan Rusia untuk mengabaikan resolusi yang telah dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Pelanggaran terhadap wilayah teritorial Ukraina masih tetap saja dilakukan oleh Rusia. Diantaranya adalah pengiriman bantuan militer di daerah konflik yaitu daerah timur Ukraina yang mengalami penyebaran konflik yang terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Vladimir Putin sendiri, Presiden Rusia yang menjabat di tahun tersebut. Namun, Vladimir Putin tidak menjelaskan di daerah mana Rusia

⁷⁷ Raf Sanchez, 2014, Ukrainian Separatists Suspected of Bringing Down Malaysia Airlines flight on Russian Border, The Telegraph, diakses dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10974821/Ukrainian-separatists-suspected-of-bringing-down-Malaysia-Airlines-flight-on-Russian-border.html>, (17/07/2017, 9:03 WIB)

⁷⁸ The Telegraph, *Op.cit*

mengirimkan bantuan militer tersebut. Keterangan Vladimir Putin, ia sampaikan di Budapest.⁷⁹

Bahkan setelah satu tahun berlalu semenjak aneksasi Crimea dari Ukraina telah terjadi, Rusia tetap bertahan dengan anggapan bahwa Crimea merupakan wilayah bagian dari Rusia. Wilayah Crimea menjadi bagian dari Rusia tersebut tidak dapat dinegosiasi lagi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Demitry Poskov pada tahun 2015, tepatnya setelah satu tahun Crimea dinyatakan bergabung dengan Rusia. Juru Biacara Rusia yang menyatakan bahwa⁸⁰ :

“Crimea is a region of the Russian Federation and of course the subject of our regions is not up for discussion.”

Sebenarnya, tindakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai untuk menghentikan konflik ini telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Adanya Perjanjian Minsk II yang dihadiri dan disepakati oleh Ukraina, Rusia, OSCE, dan bahkan dengan kelompok yang mengatasnamakan mereka sebagai pemerintahan baru dari Crimea sendiri. Awalnya, cikal bakal Perjanjian Minsk II dibicarakan di Jenewa pada tanggal 17 April 2014. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di wilayah Ukraina yang dihadiri oleh Rusia, Ukraina dan OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Dari pertemuan di Jenewa itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan bahwa ada kesepakatan bahwa semua

⁷⁹ Anton Sverev & Vladimir Soldatkin, 2014, *Putin tells Kiev to let troops surrender as Ukraine ceasefire unravels*, diakses dalam <http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis/putin-tells-kiev-to-let-troops-surrender-as-ukraine-ceasefire-unravels-idUSKBN0LL0OM20150217>, (16/10/2017, 20:58 WIB)

⁸⁰ Timothy Heritage & Darya Korsunskaya, 2015, *Russia Rules Out Handing Back Crimea, Expands War Games*, diakses dalam <http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-russia/russia-rules-out-handing-back-crimea-expands-war-games-idUSKBN0MD0Z220150317>, (16/10/2017, 22:13 WIB)

formasi militer ilegal di Ukraina harus dibubarkan, dan bahwa setiap orang yang menduduki bangunan harus dilucuti senjata dan tinggalkan.⁸¹

Pada bab ini menjelaskan bagaimana PBB sebagai organisasi resolusi konflik menjalankan tugasnya. Walaupun, PBB memiliki badan utama yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian internasional yaitu Dewan Keamanan, tidak dapat terlepas dari badan-badan utama dalam PBB lainnya. Terutama, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal yang juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian internasional.

Dalam melakukan perannya menjadi organisasi resolusi konflik PBB beberapa kali telah melakukan sidang. Baik yang ada di Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk membicarakan konflik-konflik yang dianggap dapat membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. PBB lewat DK juga telah memberikan resolusi yang memberikan sanksi baik militer dan ekonomi selama PBB berdiri. Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB dengan jasa-jasa baiknya juga telah berjasa mencegah memperburuknya keadaan di beberapa konflik salah satunya konflik Siprus.

⁸¹ BBNews, 2014, *Ukraine crisis: Deal to 'de-escalate' agreed in Geneva*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-27072351>, (16/07/2017, 10:04 WIB)